



PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI HUTAN GIRI PUSPA MELALUI PELATIHAN PENGELOLAAN WISATA ALAM BERBASIS MASYARAKAT

EMPOWERMENT OF THE GIRI PUSPA FOREST FARMERS GROUP THRU COMMUNITY-BASED NATURE TOURISM MANAGEMENT TRAINING

Wawan Hermawan^{1*}, Andi Sukandi², Iifan Auchep Venkatanathan³

^{1*}Universitas Islam Nusantara Bandung, Email: wawanhermawan@uninus.ac.id

²Universitas Islam Nusantara Bandung, Email: panglimajb449@email.com

³Universitas Islam Nusantara Bandung, Email: auchep82@gmail.com

*email koresponden: wawanhermawan@uninus.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2844>

Abstrack

Community-based nature tourism development is an important strategy for community empowerment that can enhance local economic welfare while supporting environmental sustainability. However, the success of community-based tourism management largely depends on the capacity of human resources and local institutions. This study aims to analyze the role of community-based nature tourism management training in improving individual capacities and strengthening the institutional capacity of the Giri Puspa Forest Farmer Group (Kelompok Tani Hutan/KTH) as the manager of Lembah Puspa Educamp in West Bandung Regency. This research employed a qualitative approach using a case study method. Research informants consisted of the group leader, management board members, KTH members, training facilitators, and tourism development partners selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the training contributed significantly to improving participants' competencies in tour guiding, visitor services, tourism safety, environmental interpretation, and digital marketing. Furthermore, the training strengthened institutional capacity through enhanced coordination, task distribution, member participation, and collective decision-making processes. The program also supported the implementation of Community Based Tourism (CBT) principles, as reflected in increased community involvement in tourism management and destination development. Nevertheless, several challenges remain, including limited funding, inadequate supporting facilities, and unequal competency levels among group members. The study concludes that training serves as a strategic instrument for community empowerment and institutional strengthening to support sustainable community-based nature tourism management.

Keywords: Community Empowerment; Forest Farmer Group; Training; Community-Based Nature Tourism; Community Based Tourism.



Abstrak

Pengembangan wisata alam berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Namun, keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelatihan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat dalam meningkatkan kapasitas individu dan memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Puspa sebagai pengelola Lembah Puspa Educamp di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian terdiri atas ketua kelompok, pengurus, anggota KTH, fasilitator pelatihan, dan mitra pengembangan wisata yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi anggota dalam aspek kependidikan wisata, pelayanan pengunjung, keselamatan wisata, interpretasi lingkungan, dan pemasaran digital. Selain itu, pelatihan juga memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan koordinasi, pembagian tugas, partisipasi anggota, dan pengambilan keputusan kelompok. Pelatihan turut mendukung implementasi prinsip-prinsip Community Based Tourism (CBT) yang ditandai dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pendanaan, sarana pendukung, dan belum meratanya kompetensi anggota kelompok. Penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Kelompok Tani Hutan; Pelatihan; Wisata Alam Berbasis Masyarakat; Community Based Tourism.

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan penting dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Menurut Ife (2016), pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang memungkinkan individu dan kelompok memperoleh kemampuan untuk mengendalikan keputusan, sumber daya, dan tindakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks pembangunan pedesaan, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial, kelembagaan, dan lingkungan masyarakat.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat adalah pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism (CBT). Konsep CBT menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan pariwisata. Goodwin dan Santilli (2021) menjelaskan bahwa CBT tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan CBT semakin banyak diterapkan sebagai strategi pembangunan wisata yang inklusif dan berkelanjutan.



Perkembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat memperoleh perhatian yang semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan akan model pembangunan yang berkelanjutan. Laporan United Nations World Tourism Organization menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan (UNWTO, 2023). Selain memberikan manfaat ekonomi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan penguatan modal sosial masyarakat. UNESCO Institute for Lifelong Learning (2022) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan wisata alam berbasis masyarakat menjadi salah satu alternatif pemanfaatan kawasan hutan yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung upaya konservasi lingkungan. Melalui program Perhutanan Sosial, masyarakat memperoleh akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan. Salah satu kelembagaan yang memiliki peran strategis dalam implementasi program tersebut adalah Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, termasuk dalam pengembangan wisata alam berbasis masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang besar, banyak KTH masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan wisata alam. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kompetensi kependidikan wisata, kurangnya pemahaman mengenai pelayanan wisata, manajemen risiko, keselamatan pengunjung, serta pemasaran digital menjadi faktor yang menghambat pengembangan destinasi wisata secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata alam tidak hanya membutuhkan potensi sumber daya alam, tetapi juga kapasitas masyarakat yang memadai untuk mengelolanya secara profesional dan berkelanjutan.

Menurut Chambers (2017), peningkatan kapasitas atau *capacity building* merupakan proses penting dalam pemberdayaan masyarakat karena memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Dalam konteks pengembangan wisata berbasis masyarakat, pelatihan menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelembagaan masyarakat. Penelitian Putri et al. (2021), Nugroho dan Santosa (2022), serta Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa pelatihan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Selain itu, penelitian Rachmawati, Hidayati, dan Rahayuningsih (2022) menemukan bahwa kapasitas kelembagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan wisata berbasis masyarakat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti dampak pelatihan terhadap peningkatan keterampilan individu dan manfaat ekonomi masyarakat. Kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara pelatihan pengelolaan wisata alam, penguatan kapasitas kelembagaan Kelompok Tani Hutan, dan implementasi



prinsip-prinsip Community Based Tourism dalam pengelolaan kawasan hutan masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan wisata alam berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara kolektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis keterkaitan antara pelatihan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan Kelompok Tani Hutan, serta penguatan prinsip-prinsip Community Based Tourism dalam pengelolaan kawasan hutan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek ekonomi atau peningkatan keterampilan individu, penelitian ini menempatkan pelatihan sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelatihan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat dalam meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan Kelompok Tani Hutan Giri Puspa sebagai pengelola destinasi wisata alam yang berkelanjutan di Lembah Puspa Educamp Kabupaten Bandung Barat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Puspa melalui pelatihan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan kelompok. Menurut Creswell dan Poth (2021), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sosial berdasarkan perspektif para partisipan dalam konteks yang alamiah.

Metode studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu pelaksanaan pelatihan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat pada Kelompok Tani Hutan Giri Puspa di kawasan Lembah Puspa Educamp Kabupaten Bandung Barat. Yin (2023) menjelaskan bahwa studi kasus digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata sehingga mampu menghasilkan gambaran yang utuh mengenai suatu peristiwa atau program.

Penelitian dilaksanakan di Lembah Puspa Educamp yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Giri Puspa. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut telah mengembangkan wisata alam berbasis masyarakat dan secara aktif menyelenggarakan pelatihan bagi anggota kelompok dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan wisata.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki terkait pelaksanaan pelatihan dan pengelolaan wisata alam. Informan penelitian terdiri atas pengelola kelompok, anggota kelompok, fasilitator pelatihan, dan mitra yang terlibat dalam pengembangan wisata alam.



Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Ketua Kelompok Tani Hutan Giri Puspa	1 orang
2	Pengurus Kelompok Tani Hutan	2 orang
3	Anggota KTH peserta pelatihan	6 orang
4	Fasilitator/Narasumber pelatihan	2 orang
5	Mitra pengembangan wisata alam	1 orang
Total		12 orang

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelatihan, perubahan kapasitas peserta, penguatan kelembagaan kelompok, serta dampak pelatihan terhadap pengelolaan wisata alam. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati aktivitas pelatihan, keterlibatan peserta, penerapan hasil pelatihan dalam pengelolaan wisata, serta dinamika organisasi kelompok. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, daftar hadir peserta, foto kegiatan, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing and verification). Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ketua kelompok, pengurus, anggota, fasilitator, dan mitra program. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, member checking dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan mengenai hasil interpretasi data yang dilakukan peneliti. Teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian sebagaimana direkomendasikan oleh Creswell dan Poth (2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Lembah Puspa Educamp yang berlokasi di Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata alam berbasis masyarakat yang memanfaatkan potensi sumber daya hutan, lingkungan alam pegunungan, dan aktivitas edukasi lingkungan sebagai daya tarik utama wisata. Lembah Puspa Educamp dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Puspa yang memperoleh akses pengelolaan kawasan melalui program Perhutanan Sosial sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.



Tabel 2. Profil Kelompok Tani Hutan Giri Puspa

Aspek	Keterangan
Nama Kelompok	Kelompok Tani Hutan Giri Puspa
Lokasi	Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pembentukan	2022
Dasar Hukum	SK Kepala Desa Cikole Nomor 141/23/SK-Pem/2022
Jumlah Anggota	16 orang
Bidang Kegiatan	Pengelolaan hutan dan wisata alam berbasis masyarakat
Kawasan Wisata	Lembah Puspa Educamp

Sumber: Dokumentasi KTH Giri Puspa, 2025.

Berdasarkan hasil dokumentasi, KTH Giri Puspa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikole Nomor 141/23/SK-Pem/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan memiliki anggota aktif sebanyak 16 orang yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produktif yang berkelanjutan.





Hasil observasi menunjukkan bahwa Lembah Puspa Educamp memiliki potensi wisata yang cukup beragam, meliputi wisata edukasi lingkungan, wisata petualangan, kegiatan berkemah, pembelajaran konservasi, serta berbagai aktivitas berbasis alam terbuka. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Namun demikian, pengelolaan wisata masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia, kompetensi pelayanan wisata, pemasaran destinasi, dan penguatan kelembagaan kelompok. Hasil wawancara dengan Ketua KTH Giri Puspa menunjukkan bahwa pengembangan wisata alam dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. “Kami ingin kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai kawasan hutan yang dijaga, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui kegiatan wisata yang tetap memperhatikan aspek konservasi.” (Ketua KTH Giri Puspa, wawancara, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata alam di Lembah Puspa Educamp tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Menurut Ife (2016), pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang memungkinkan masyarakat mengoptimalkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keberadaan KTH Giri Puspa menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam mengelola destinasi wisata secara profesional, KTH Giri Puspa menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat. Pelatihan tersebut menjadi salah satu strategi penguatan kapasitas individu dan kelembagaan yang diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata alam di Lembah Puspa Educamp.

Kondisi Awal Kapasitas Kelompok Tani Hutan Giri Puspa

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebelum pelatihan dilaksanakan, anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Puspa telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan kawasan hutan dan kegiatan konservasi, namun belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan wisata alam. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada aspek pelayanan wisata, kependidikan wisata alam, manajemen risiko, keselamatan pengunjung, interpretasi lingkungan, dan pemasaran digital destinasi wisata. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan wisata masih dilakukan berdasarkan pengalaman praktis dan belum didukung oleh kompetensi teknis yang memadai.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil dokumentasi yang menunjukkan bahwa dari 16 anggota aktif KTH Giri Puspa hanya satu orang yang pernah mengikuti pelatihan kependidikan wisata alam bersertifikat. Data tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Selain itu, dokumen kelembagaan menunjukkan bahwa kelompok telah memiliki legalitas melalui Surat Keputusan Kepala Desa Cikole Nomor 141/23/SK-Pem/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pembentukan Kelompok Tani Hutan Giri Puspa.



Hasil wawancara dengan Ketua KTH menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelatihan muncul karena anggota kelompok belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola kegiatan wisata. “Kami sudah terbiasa mengelola kawasan hutan, tetapi ketika mulai mengembangkan wisata alam, banyak hal yang belum kami pahami seperti pelayanan wisata, keselamatan pengunjung, dan cara mempromosikan destinasi secara digital.” (Ketua KTH Giri Puspa, wawancara, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pengembangan wisata alam bukan terletak pada ketersediaan sumber daya alam, melainkan pada kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Menurut Chambers (2017), peningkatan kapasitas masyarakat merupakan prasyarat penting dalam proses pemberdayaan karena memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan berkelanjutan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Rahman et al. (2023) yang menemukan bahwa keterbatasan kompetensi pengelola menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat.

Implementasi Pelatihan Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dirancang untuk meningkatkan kapasitas anggota KTH melalui berbagai materi yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan wisata alam. Materi pelatihan meliputi konsep wisata alam berbasis masyarakat, teknik kependudukan wisata alam, keselamatan dan keamanan wisata, konservasi lingkungan, pelayanan pengunjung, pengelolaan usaha wisata, serta pemasaran digital destinasi wisata. Pelatihan dilaksanakan menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, simulasi lapangan, praktik kependudukan, dan studi kasus.

Tabel 3. Materi Pelatihan Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat

No	Materi Pelatihan	Tujuan
1	Konsep Community Based Tourism (CBT)	Memahami prinsip wisata berbasis masyarakat
2	Kependudukan Wisata Alam	Meningkatkan kemampuan pemanduan wisata
3	Pelayanan Pengunjung	Meningkatkan kualitas pelayanan wisata
4	Keselamatan dan Keamanan Wisata	Mengurangi risiko kegiatan wisata
5	Konservasi Lingkungan	Menumbuhkan kesadaran pelestarian lingkungan
6	Pengelolaan Usaha Wisata	Mengembangkan aspek ekonomi wisata
7	Pemasaran Digital	Memperluas promosi destinasi wisata

Sumber: Dokumentasi kegiatan pelatihan, 2025.

Hasil observasi selama kegiatan pelatihan menunjukkan tingginya keterlibatan peserta dalam berbagai sesi praktik. Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga melakukan simulasi pelayanan wisata, praktik interpretasi lingkungan, serta latihan penanganan keselamatan pengunjung. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan adanya interaksi aktif antara peserta dan fasilitator dalam membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan wisata alam.

Salah seorang peserta pelatihan menyatakan: “Pelatihan ini membantu kami memahami bagaimana menjelaskan potensi lingkungan kepada pengunjung, memberikan pelayanan yang baik, dan menjaga keamanan wisatawan ketika berada di kawasan hutan.” (Anggota KTH, wawancara, 2025).



Menurut UNESCO Institute for Lifelong Learning (2022), pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, pelatihan berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan sekaligus media penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata alam.

Dampak Pelatihan terhadap Peningkatan Kapasitas Individu

Hasil observasi pascapelatihan menunjukkan adanya perubahan kemampuan anggota KTH dalam menjalankan berbagai aktivitas wisata. Anggota kelompok mulai mampu melakukan pelayanan wisata, menyusun paket wisata edukatif, memberikan interpretasi lingkungan, serta menerapkan prosedur keselamatan wisata secara lebih sistematis.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan peserta pelatihan. “Sebelumnya kami hanya mengantar pengunjung berkeliling kawasan. Setelah pelatihan, kami mengetahui cara menyampaikan informasi lingkungan, membuat kegiatan edukatif, dan mengelola wisata secara lebih profesional.” (Peserta Pelatihan, wawancara, 2025).

Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa setelah pelatihan anggota mulai mengembangkan paket wisata edukasi lingkungan dan kegiatan interpretasi alam yang sebelumnya belum tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas teknis maupun pedagogis dalam penyelenggaraan wisata berbasis pembelajaran.

Temuan ini sejalan dengan teori Capacity Building yang dikemukakan Chambers (2017) yang menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan merupakan fondasi utama dalam membangun kemandirian masyarakat. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Harprianto et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pelatihan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan dan mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan.

Tabel 4. Perubahan Kapasitas Anggota KTH Setelah Mengikuti Pelatihan

Aspek Kapasitas	Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
Pemahaman wisata berbasis masyarakat	Rendah	Baik
Kemampuan kepemanduan wisata	Terbatas	Meningkat
Pelayanan wisata	Belum terstandar	Lebih terstruktur
Interpretasi lingkungan	Rendah	Meningkat
Keselamatan wisata	Belum optimal	Lebih baik
Pemasaran digital	Sangat terbatas	Mulai diterapkan

Dampak Pelatihan terhadap Penguatan Kelembagaan Kelompok

Selain meningkatkan kapasitas individu, pelatihan juga berdampak pada penguatan kapasitas kelembagaan KTH Giri Puspa. Hasil observasi menunjukkan adanya pembagian tugas yang lebih jelas di antara anggota kelompok setelah pelatihan berlangsung. Anggota mulai memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam bidang pelayanan wisata, kepemanduan, promosi, konservasi, dan keamanan pengunjung. Ketua kelompok menjelaskan: “Setelah pelatihan, anggota lebih memahami perannya masing-masing sehingga koordinasi menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.” (Ketua KTH Giri Puspa, wawancara, 2025).

Hasil dokumentasi program kerja kelompok juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas koordinasi dan perencanaan kegiatan wisata setelah pelatihan dilaksanakan. Temuan



ini mengindikasikan bahwa pelatihan tidak hanya menghasilkan perubahan pada tingkat individu, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi kelompok.

Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah pelatihan terjadi peningkatan koordinasi antaranggota kelompok. Pembagian tugas menjadi lebih jelas, baik dalam pelayanan wisata, kependamuan, promosi, maupun pengelolaan kawasan. Selain itu, anggota kelompok secara rutin melakukan diskusi dan rapat koordinasi untuk merencanakan kegiatan wisata serta mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan.



Gambar 2. Diskusi dengan Anggota KTH

Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa proses koordinasi menjadi lebih intensif setelah pelatihan dilaksanakan. Anggota kelompok tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan kegiatan wisata, tetapi juga berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan yang ditandai dengan meningkatnya kerja sama, komunikasi, dan partisipasi anggota dalam organisasi.

Temuan tersebut sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Ife (2016) yang menyatakan bahwa pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada penguatan organisasi masyarakat agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri. Penelitian Rachmawati, Hidayati, dan Rahayuningsih (2022) juga menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengembangan wisata berbasis masyarakat.

Implementasi Community Based Tourism dalam Pengelolaan Wisata Alam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan turut memperkuat penerapan prinsip-prinsip Community Based Tourism (CBT) dalam pengelolaan wisata alam di Lembah Puspa Educamp. Setelah mengikuti pelatihan, anggota KTH lebih aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan wisata. Partisipasi masyarakat tidak lagi terbatas pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota kelompok mulai menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi lingkungan. “Wisata tidak hanya untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga untuk menjaga kawasan hutan agar tetap lestari karena itu yang menjadi daya tarik utama wisata kami.” (Anggota KTH, wawancara, 2025).



Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan telah mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Goodwin dan Santilli (2021) menjelaskan bahwa Community Based Tourism menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi serta penerima manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan wisata. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Latianingsih et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan wisata berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat lokal dan penguatan kapasitas komunitas.

Tabel 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pelatihan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Komitmen anggota KTH	Keterbatasan anggaran
Dukungan pemerintah dan mitra	Keterbatasan pelatihan lanjutan
Potensi wisata alam yang memadai	Belum semua anggota memiliki kompetensi yang sama
Antusiasme peserta pelatihan	Keterbatasan sarana pendukung
Dukungan masyarakat sekitar	Keterbatasan akses promosi

Sumber: Hasil wawancara dan observasi peneliti, 2025.

Berdasarkan Tabel 5, keberhasilan pelaksanaan pelatihan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat di Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Puspa didukung oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor pendukung utama adalah tingginya komitmen anggota kelompok untuk mengembangkan kawasan wisata sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dengan antusias serta aktif terlibat dalam sesi diskusi maupun praktik lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran bersama mengenai pentingnya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan wisata alam.

Selain itu, dukungan dari pemerintah, lembaga mitra, dan masyarakat sekitar turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan program. Hasil dokumentasi menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan, baik dalam bentuk fasilitasi kegiatan, penyediaan narasumber, maupun dukungan teknis lainnya. Potensi wisata alam yang dimiliki Lembah Puspa Educamp juga menjadi faktor pendukung yang penting karena memberikan ruang bagi peserta untuk menerapkan secara langsung materi yang diperoleh selama pelatihan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ife (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal yang tersedia.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan. Keterbatasan pendanaan berdampak pada frekuensi pelatihan, penyediaan fasilitas pendukung, serta kesempatan anggota untuk mengikuti pelatihan lanjutan yang lebih spesifik. Salah seorang pengurus kelompok menyampaikan bahwa kebutuhan peningkatan kapasitas masih cukup besar, namun belum seluruhnya dapat difasilitasi karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Selain faktor pendanaan, belum meratanya kompetensi anggota kelompok juga menjadi tantangan dalam pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Hasil observasi



menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan keterampilan antaranggota dalam bidang kependudukan wisata, pelayanan pengunjung, dan pemasaran digital. Kondisi ini menyebabkan proses transfer pengetahuan dan penerapan hasil pelatihan berlangsung dengan kecepatan yang berbeda pada setiap anggota kelompok. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rachmawati, Hidayati, dan Rahayuningsih (2022) yang menjelaskan bahwa kesenjangan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat.

Keterbatasan sarana pendukung dan akses promosi juga menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi hasil pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, promosi destinasi wisata masih didominasi oleh media sosial sederhana dan jaringan personal anggota kelompok. Padahal, pemasaran digital yang lebih terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan jangkauan pasar wisata. Menurut Goodwin dan Santilli (2021), keberhasilan Community Based Tourism tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan komunitas dalam membangun jaringan pemasaran dan kemitraan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelatihan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat di KTH Giri Puspa merupakan hasil interaksi antara faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara kelompok masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga pendamping agar pengembangan wisata alam berbasis masyarakat dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kapasitas individu dan memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Puspa sebagai pengelola Lembah Puspa Educamp di Kabupaten Bandung Barat. Sebelum pelatihan dilaksanakan, anggota kelompok masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek kependudukan wisata, pelayanan pengunjung, keselamatan wisata, interpretasi lingkungan, dan pemasaran destinasi. Melalui pelatihan yang dilaksanakan secara partisipatif, anggota kelompok memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik sehingga mampu mengelola kegiatan wisata secara lebih terstruktur, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas individu, tetapi turut memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok. Penguatan tersebut terlihat dari meningkatnya koordinasi antaranggota, pembagian tugas yang lebih jelas, keterlibatan anggota dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta tumbuhnya komitmen bersama dalam mengembangkan wisata alam berbasis masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelatihan telah menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu mendorong peningkatan kemampuan teknis sekaligus memperkuat modal sosial dan organisasi kelompok.



Selain itu, pelatihan turut mendukung implementasi prinsip-prinsip Community Based Tourism (CBT) dalam pengelolaan wisata alam. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan wisata, tetapi juga terlibat dalam proses pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata alam berbasis masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan kawasan hutan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain keterbatasan pendanaan, belum meratanya kompetensi anggota kelompok, keterbatasan sarana pendukung, dan masih terbatasnya akses promosi wisata. Oleh karena itu, diperlukan program penguatan kapasitas yang berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan, pendampingan kelembagaan, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu kelompok tani hutan dan satu lokasi wisata alam sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh kelompok pengelola wisata berbasis masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lokasi penelitian, menggunakan pendekatan komparatif, atau mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wisata alam berbasis masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (2014). *Rural development: Putting the last first*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2021). *Community-based tourism: A success?*. International Centre for Responsible Tourism.
- Harprianto, R. M. A., Suryono, Y., & Nurhayati, S. (2025). The role of non-formal education in developing the potential of tourism villages. *Journal of Nonformal Education*, 11(1), 45–58.
- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Latianingsih, N., Suprijanto, S., & Mulyono, D. (2025). Community based tourism in sustainable tourism development: Strengthening local participation and empowerment. *Journal of Community Development Research*, 18(2), 115–129.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Nugroho, A., & Santosa, B. (2022). Capacity building of community-based tourism managers through participatory training. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 134–148.
- Putri, D. A., Wibowo, A., & Hidayat, R. (2021). Community empowerment through tourism



- management training in rural areas. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1), 55–67.
- Rachmawati, E., Hidayati, S., & Rahayuningsih, T. (2022). Community empowerment in community-based tourism development. *Journal of Community Empowerment*, 6(3), 201–214.
- Rahman, A., Suryadi, D., & Firmansyah, E. (2023). Training effectiveness in improving community competence for sustainable tourism management. *Journal of Tourism and Community Development*, 9(1), 22–35.
- UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2022). Fifth global report on adult learning and education (GRALE 5): Citizenship education—Empowering adults for change. UNESCO Institute for Lifelong Learning.
- United Nations World Tourism Organization. (2023). Tourism and rural development: A policy perspective. UNWTO.
- Yin, R. K. (2023). Case study research and applications: Design and methods (7th ed.). Sage Publications.